

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, definisi perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut definisi tersebut, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah saja saja, tetapi juga terdapat ikatan batin, yaitu ikatan yang mendasari kepercayaan antara calon suami isteri.

Bila definisi tersebut ditelaah, maka terdapat lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Berikut ini definisi perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Menurut Asser, Scholten dan Wiarda :

“Perkawinan ialah suatu persekutuan antara pria dengan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal.”¹⁸

Menurut Subekti :

“Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”¹⁹

Menurut Ali Afandi:

“Perkawinan adalah persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri tertentu”.²⁰

Dilangsungkannya suatu perkawinan pasti memiliki tujuan. Tujuan pernikahan menurut filosof Islam Imam Ghazali adalah :²¹

- a) Memperoleh keturunan yang sah.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan maupun kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Membentuk rasa kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjodjo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm.18.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 2010), hlm.22.

²⁰ R. Soetojo, *op.cit.*, hlm.12.

²¹ Muhammad Yasin, *Arti dan tujuan Perkawinan* (online), <http://hukumonline.com> (25 Oktober 2016)

2. Asas Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:²²

1. Asas Perkawinan Kekal

Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia serta kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Dengan perkawinan yang kekal dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, maka perkawinan dikatakan sah.

3. Asas Perkawinan Terdaftar

Perkawinan mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

4. Asas Perkawinan Monogami

UUP menganut asas monogami, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya,

²² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 264.

dalam waktu yang bersamaan, seorang suami dan seorang istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.

5. Poligami (dijadikan pengecualian).

Pada kondisi tertentu perkawinan poligami dijadikan pengecualian dari perkawinan monogami, yaitu sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan memperbolehkannya. Namun, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UUP.

6. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Pasal 3 ayat (1) UUP tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami disaat yang bersamaan.

7. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan

Berkehendak

Setiap perkawinan harus didasari dari persetujuan kedua belah pihak, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

8. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Kedudukan dan hak suami istri dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat adalah seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu.

9. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan tertentu dan hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah Hakim atau juru pendamai tidak berhasil melakukan mediasi. Prinsip ini terdapat pada Pasal 39 UUP.

2.2. Kajian Umum Tentang Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatatkan dan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan

Pada prinsipnya adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan suatu akta perkawinan.²³

Definisi dari pencatatan perkawinan adalah lebih kepada suatu prosedur mendaftarkan serta menuliskan suatu perkawinan kedalam buku register tertentu yang terdapat di Kantor Catatan Sipil agar nantinya dikeluarkan akta nikah. Akta nikah tersebut merupakan akta autentik sebagai bentuk bukti bahwa terjadinya suatu Perkawinan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum. Pencatatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan perkawinan pada lazimnya yaitu perkawinan dengan para pihak yang seagama, namun juga memiliki peran dalam perkawinan beda agama, dalam hal ini pencatatan perkawinan memiliki peran sebagai unsur penentu apakah suatu perkawinan beda agama dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah atau tidak sah secara hukum karena adanya perbedaan keyakinan dari pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

²³ *Ibid*, hlm. 222.

Pencatatan Perkawinan di Catatan Sipil hanya terhadap Perkawinan orang yang beragama selain Islam termasuk juga perkawinan antar agama sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, sedangkan bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan Perkawinan berhubungan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP, yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam Bab II PP nomor 9 tahun 1975. Menurut pasal 2 PP nomor 9 tahun 1975, perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam maka pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan tersebut diatur pada Pasal 3 sampai Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975.²⁴

Undang-undang lain yang mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.82.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 67 yang memuat ketentuan syarat dan tata cara. Selanjutnya, pada pasal 69 terhadap pencatatan perkawinan yang berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan tersebut. Terhadap pencatatan perkawinan yang berdasarkan penetapan pengadilan tersebut juga disebutkan pada pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada penjelasan pasal 35 huruf a tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Selain sudah dijelaskan dalam ketentuan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, terhadap perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut membutuhkan penetapan dari pengadilan maka sudah jelas pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan beda agama menurut penulis diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

2.2.1. Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatatkan

Terhadap perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan maka sah atau tidaknya perkawinan tersebut dapat dipertanyakan, karena pada Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Jika suatu perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, maka menurut undang-undang perkawinan dengan sendirinya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan

perkawinan. Pada konteks perkawinan beda agama yang menjadi permasalahan adalah ketentuan menurut hukum agama manakah yang dipakai, karena dalam perkawinan tersebut melibatkan dua agama berbeda yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda tentang tata cara melakukan perkawinan.

2.2.2. Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan

Menurut hukum nasional, perkawinan perkawinan beda agama yang dicatatkan adalah diakui dan dianggap sebagai perkawinan yang sah, dan memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan se-agama pada umumnya.

2.3. Kajian Umum Tentang Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Perceraian menurut Pasal 38 UUP yaitu putusnya perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 39 dimuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan, setelah pengadilan mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁵

Perceraian harus disertai dengan alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni:

²⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Internusa, 1985), hlm.42.

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.4. Kajian Umum Tentang Harta Perkawinan

2.4.1. Pengertian Harta Perkawinan

Harta perkawinan adalah seluruh harta yang berada dibawah penguasaan suami istri selama masa perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri maupun barang-barang hadiah.

2.4.2. Klasifikasi Harta Perkawinan

1. Harta Bawaan

Harta yang diperoleh atau dibawah penguasaan suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan digolongkan sebagai harta bawaan.

Jenis-jenis harta bawaan adalah:

- a. Harta peninggalan, yaitu harta yang dibawa kedalam pernikahan yang berasal dari peninggalan orang tua yang dialihkan penguasaan, pengaturan, dan pemanfaatanya untuk kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak dibagi per-bagian kepada setiap ahli waris.
- b. Harta warisan, yaitu harta yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.
- c. Harta wasiat, yaitu harta atau barang yang berasal dari hibah atau wasiat seseorang atau kerabat.
- d. Harta pemberian atau hadiah, yaitu yang asalnya dari pemberian atau hadiah dari seseorang.

Sepanjang para pihak tidak menentukan lain, harta bawaan maupun harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan milik suami atau istri adalah dibawah penguasaan masing-masing.

2. Harta Bersama

Harta bersama dalam UUP didasarkan dengan pola hukum adat, yaitu pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat ketentuan kategorial bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

merupakan harta bersama. Contoh harta bersama misalnya gaji pekerjaan, atau pendapatan suami istri dari suatu usaha tertentu, atau mungkin juga berupa keuntungan yang diperoleh dari saham yang diinvestasikan di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak.

Terhadap penggunaan harta bersama oleh salah satu suami atau istri, pasal 36 UUP menentukan harus ada persetujuan kedua belah pihak.²⁶ Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak baik suami atau istri maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan bisa saja dituntut secara hukum.²⁷

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 37 UUP beserta penjelasannya.

Menurut Mocd. Idris Ramulyo, pada penjelasan atas Pasal 37 ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya, konsekuensinya jika perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama bekas suami istri itu.²⁸

Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan gugatan harta bersama adalah:

²⁶Veny Rizki Indahsari, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi*, (Jember: Fakultas Hukum Unej, 2014), hlm. 3.

²⁷Etty Rochaety, *Analisis Yuridis tentang Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2013), hlm. 6.

²⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 117.

- a) Kedua pihak atau salah satu pihak membutuhkan harta bersama.
- b) Salah satu pihak mempunyai niat tidak baik atau ingin menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai.²⁹

3. Harta Perolehan

Harta yang diperoleh suami atau istri semasa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris disebut dengan harta perolehan. Suami dan istri secara individu memiliki kekuasaan pribadi dan hak sepenuhnya atas harta perolehan tersebut, seperti halnya terhadap harta bawaan. Pengecualian keadaan yang demikian dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan.

²⁹ Nanik Rukmana, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Praktek di Pengadilan Agama Mataram*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013), hlm. 5.